



Community Groups in Policy Representation and Responsiveness: Jakarta Bay Reclamation Case

Peran Kelompok Masyarakat dalam Representasi dan Responsivitas Kebijakan: Studi Reklamasi Teluk Jakarta

Najwa Annisa Balqis¹, Aisyah Chairani², Khanza Azzahwa Rhamadani³, Faqih Saverio⁴,
Ridwan⁵, Maisarah Mitra Adrian⁶

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Najwa Annisa Balqis

✉ najwaannisa82@gmail.com

History:

Submitted: 15-06-2026

Revised: 09-08-2026

Accepted: 20-08-2026

Keyword:

*Local Democracy; Community Groups;
Government Responsiveness; Jakarta Bay
Reclamation.*

Kata Kunci:

Demokrasi Lokal; Kelompok Masyarakat;
Reklamasi Teluk Jakarta; Responsivitas
Pemerintah.

Abstract

The Jakarta Bay reclamation dispute has shifted from a local zoning conflict into a National Strategic Project (Proyek Strategis Nasional/PSN) through the Giant Sea Wall, narrowing opportunities for public participation. This study examines how WALHI, KNTI, and the Save Jakarta Bay Coalition represent public interests and influence government responsiveness within this centralized policy framework. Using a qualitative descriptive approach, the research analyzes policy documents, court rulings, and civil society statements through Robert Putnam's social capital framework. The findings show that these groups have developed strong bonding and bridging social capital through internal solidarity and inter-organizational alliances. However, their linking social capital, reflected in limited vertical access to national elites, remains weak, restricting government responsiveness to symbolic and procedural concessions. The study concludes that strong grassroots social capital does not automatically produce responsive policy when decision-making authority shifts from decentralized to centralized governance.

Abstrak

Sengketa reklamasi Teluk Jakarta tidak lagi hanya menjadi persoalan tata ruang, tetapi telah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa). Perubahan ini mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana WALHI, KNTI, dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memperjuangkan kepentingan publik serta memengaruhi responsivitas pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, putusan pengadilan, dan pernyataan resmi masyarakat sipil dengan menggunakan kerangka modal sosial Robert Putnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kelompok berhasil membangun solidaritas internal dan kerja sama antarlembaga yang kuat. Namun, akses mereka kepada pengambil keputusan di tingkat nasional masih terbatas sehingga respons pemerintah lebih banyak berupa langkah simbolik dan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial yang kuat belum tentu menghasilkan kebijakan yang responsif ketika kewenangan pengambilan keputusan semakin terpusat.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/jsd.v2i1.417>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Representasi dan responsivitas menjadi ukuran penting bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal, karena keduanya menentukan apakah suara warga benar-benar sampai dan diakomodasi dalam kebijakan.¹ Kelompok masyarakat, mulai dari organisasi lingkungan hingga komunitas nelayan, berperan menjaga agar mekanisme ini tidak berhenti sebagai formalitas prosedural, melainkan benar-benar berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan antara negara dan warga.

Ketegangan antara kelompok masyarakat dan negara ini paling nyata terlihat pada kasus reklamasi Teluk Jakarta, sebuah rencana yang sesungguhnya sudah bergulir sejak Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan berulang kali memicu konflik hukum serta penolakan warga pesisir sepanjang dekade 2010-an.² Namun, memasuki tahun 2026, konflik ini tidak lagi sekadar sengketa tata ruang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga pesisir. Reklamasi kini telah dilebur ke dalam proyek *Giant Sea Wall* (GSW) Pantai Utara Jawa, sebuah program mitigasi banjir dan adaptasi iklim yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target *groundbreaking* pada September 2026.³ Pergeseran skala inilah yang menjadi persoalan mendasar penelitian ini dimana representasi kepentingan publik yang dahulu berhadapan dengan pemerintah daerah, kini harus berhadapan dengan otoritas nasional yang membawa kepentingan investasi dan kedaruratan ekologis sekaligus.

Pergeseran status proyek dari kebijakan daerah menjadi PSN membawa konsekuensi struktural yang penting. Ketika otoritas pengambilan keputusan berpindah dari ranah Pemprov DKI yang relatif dapat dijangkau warga, ke ranah Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BPI) di tingkat pusat yang lebih tertutup, jalur-jalur representasi yang selama ini efektif, seperti litigasi di PTUN, kehilangan daya cengkeramnya. Narasi kedaruratan iklim yang menyertai status PSN membuat keberatan warga pesisir cenderung diposisikan sebagai hambatan teknis, bukan sebagai bagian sah dari proses

¹Timothy D. Sisk et al., *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan International IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik, dan Kepemerintahan* (Stockholm: International IDEA, 2002).

²LBH Jakarta, "Teluk Jakarta, Proyek Ambisius Penuh Pelanggaran," LBH Jakarta, 1 April 2016, <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-ambisius-penuh-pelanggaran/>.

³Tikkyrino Kurniawan et al., "Revisiting the Climate Change Adaptation Strategy of Jakarta's Coastal Communities," *Ocean & Coastal Management* 253 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107112>

demokratis.⁴ Paradoks inilah yang mendasari penelitian ini, gerakan warga pesisir dan organisasi masyarakat sipil telah berhasil membangun solidaritas dan jaringan advokasi yang kuat selama satu dekade terakhir, tetapi kekuatan tersebut belum tentu cukup untuk menembus struktur pengambilan keputusan yang kini tersentralisasi.

Penelitian ini menggunakan tiga konsep utama sebagai pisau analisis yaitu representasi politik, responsivitas pemerintah, dan demokrasi lokal. Representasi politik dilihat dari sejauh mana aspirasi kelompok masyarakat mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan publik,⁵ sementara responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah menanggapi kebutuhan tersebut secara tepat dan substantif.⁶ Kedua konsep ini dioperasionalkan melalui Teori Modal Sosial (*Social Capital*) Robert D. Putnam, yang membedakan tiga bentuk modal sosial yaitu *bonding* (solidaritas internal), *bridging* (jaringan lintas kelompok), dan *linking* (akses vertikal ke elite pengambil kebijakan).⁷ Kerangka triadik ini penting karena, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian pembahasan, kekuatan bonding dan bridging tidak serta-merta menghasilkan linking yang memadai, terutama ketika struktur negara bersifat sentralistik.

Literatur terdahulu telah memetakan sebagian dari dinamika ini. Paradise mendokumentasikan peran WALHI Jakarta melalui advokasi, kampanye publik, dan litigasi dalam menekan pemerintah pada periode reklamasi konvensional.⁸ Alamsyah dan Wahyuningroem menunjukkan bagaimana perlawanan nelayan tahun 2016–2020 merupakan bentuk aktualisasi kewargaan penuh (*full citizenship*), di mana warga bertransformasi dari objek menjadi subjek kebijakan.⁹ Alamsyah dan Samadhi menyoroti keterlibatan aktif nelayan perempuan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi

⁴Kompas, "Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta #ReklamasiJakarta," Interaktif Kompas, <https://interaktif.kompas.id/baca/reklamasijakarta/>.

⁵Ikhsan Darmawan, "Menggugat (Praktik) Representasi Politik," *Jurnal Politik* 2, no. 2 (2017): 6, <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.1119>.

⁶Amril Hans, *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori dan Implementasi* (Makassar: Unhas Press, 2022).

⁷Robert D. Putnam, Raffaella Y. Nanetti, and Robert Leonardi, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).

⁸Muhammad Astar Paradise, "Peran Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Reklamasi Teluk Jakarta" (PhD diss., Universitas Nasional, 2024), <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10185>.

⁹Syauiyid Alamsyah dan Sri Lestari Wahyuningroem, "Aktualisasi Dimensi Kewargaan Penuh (Full Citizenship) dalam Gerakan Perlawanan Nelayan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016–2020," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 2 (2025): 159–179, <https://doi.org/10.14710/politika.16.2.2025.159-179>.

kepentingan kapital,¹⁰ sementara Prabowo dkk. menekankan relevansi pendekatan pembangunan berbasis komunitas untuk pengelolaan pesisir berkelanjutan.¹¹ Di ranah yang lebih baru, Putri dkk. mengkaji transformasi pesisir Jakarta melalui proyek GSW dari perspektif keberlanjutan sosial-ekologis,¹² dan Surtiari dkk. menelusuri akar sosial-politik dari kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) yang dialami komunitas pesisir rentan di kawasan Jakarta Raya.¹³

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan kelompok masyarakat sebagai aktor tunggal dalam klaster gerakan sosial yang terisolasi, dan yang sebagian besar berhenti pada analisis periode reklamasi konvensional 2015–2020, penelitian ini menawarkan dua kebaruan sekaligus. Pertama, secara analitis, penelitian ini menempatkan keragaman kelompok masyarakat, baik organisasi lingkungan, serikat nelayan, maupun koalisi lintas isu, secara integratif dalam satu kerangka triadik modal sosial Putnam. Kedua, secara empiris, penelitian ini mengangkat objek kontemporer yang belum banyak dikaji yaitu bagaimana representasi kelompok masyarakat beroperasi ketika isu reklamasi berevolusi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional *Giant Sea Wall* pada 2026.

Argumen utama yang diajukan penelitian ini adalah bahwa modal sosial horizontal, yakni *bonding* dan *bridging*, yang telah terbangun kuat di tingkat akar rumput sejak era reklamasi konvensional, tidak secara otomatis dikonversi menjadi *linking social capital* yang memadai ketika otoritas kebijakan bergeser dari ranah desentralisasi ke sentralisasi. Implikasinya, penguatan demokrasi lokal pada kasus semacam ini menuntut bukan hanya konsolidasi gerakan warga, tetapi juga terbukanya kanal representasi baru yang mampu menjangkau otoritas nasional, sesuatu yang menjadi bahan rekomendasi kebijakan pada bagian akhir tulisan ini.

¹⁰Syauiyid Alamsyah dan Willy Purna Samadhi, "Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 229–242, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2878>.

¹¹Hendro Prabowo et al., "Saatnya Mengembangkan (Lagi) Community Based Development di Kawasan Pesisir Indonesia," *Prosiding Temu Ilmiah* 9, no. 1 (Desember 2021): K039–K048, <https://doi.org/10.32315/ti.9.k039>.

¹²A. Putri et al., "Transformasi Pesisir Jakarta: Kajian Komprehensif Giant Sea Wall untuk Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Ekologis," *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 115–127, <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2016>.

¹³G. A. K. Surtiari et al., "Social and Political Roots of Loss and Damage: A Study of Vulnerable Coastal Communities in Greater Jakarta," *Journal of Disaster Research* 20, no. 5 (2025): 710–25, <https://doi.org/10.20965/JDR.2025.P0710>.

2. Perumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang yang telah menjelaskan pentingnya permasalahan yang dikaji, penelitian ini dirancang untuk menelaah sejumlah aspek utama yang kemudian dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana kelompok masyarakat merepresentasikan dan menyuarakan kepentingan publik dalam isu reklamasi Teluk Jakarta yang kini berkembang dalam konteks Proyek Strategis Nasional *Giant Sea Wall* 2026?
- b. Sejauh mana peran kelompok masyarakat memengaruhi responsivitas pemerintah dan dinamika demokrasi lokal dalam menghadapi perubahan tata kelola reklamasi Teluk Jakarta menuju Proyek Strategis Nasional *Giant Sea Wall*?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁴ Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, proses, dan konteks yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok masyarakat dalam mewakili kepentingan publik serta responsivitas kebijakan pemerintah terhadap reklamasi Teluk Jakarta dalam perspektif demokrasi lokal.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada dinamika interaksi antara aktor-aktor demokrasi yang terlibat langsung dalam kontestasi kebijakan reklamasi dan GSW, yaitu organisasi masyarakat sipil (WALHI, KNTI, KIARA, dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta), lembaga bantuan hukum (LBH Jakarta dan YLBHI), komunitas nelayan pesisir utara Jakarta, serta otoritas pemerintah pada tingkat daerah dan pusat (Pemprov DKI Jakarta dan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa). Karena penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa wawancara langsung, suara aktor-aktor tersebut ditelusuri melalui dokumen resmi dan pernyataan publik yang mereka terbitkan sendiri, seperti rilis pers, keterangan sikap organisasi, dan risalah persidangan, sehingga posisi dan argumen masing-masing aktor tetap dapat dianalisis secara langsung dari sumber primer mereka, bukan hanya dari pemberitaan pihak ketiga.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2023.

Dokumen yang dianalisis mencakup empat kategori. Pertama, dokumen sikap resmi organisasi masyarakat sipil, seperti kesimpulan gugatan WALHI atas izin reklamasi Pulau F, I, dan K, serta siaran pers YLBHI mengenai pelanggaran HAM dalam proyek reklamasi. Kedua, risalah dan putusan persidangan PTUN terkait pembatalan izin reklamasi periode 2016–2017. Ketiga, dokumen kebijakan dan pemberitaan resmi mengenai status Proyek Strategis Nasional *Giant Sea Wall* periode 2024–2026, termasuk kajian keberlanjutan sosial-ekologisnya. Keempat, literatur akademik terdahulu mengenai representasi, responsivitas, dan modal sosial dalam konteks gerakan pesisir Jakarta. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi langsung dengan aktor dan periode yang dikaji serta kredibilitas penerbit.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang dioperasionalkan melalui triad modal sosial Putnam, bukan model manajemen data generik. Setiap dokumen dan pernyataan aktor dikategorikan ke dalam tiga tema yaitu *bonding* (bukti solidaritas internal antarwarga terdampak), *bridging* (bukti aliansi dan pertukaran informasi lintas organisasi), dan *linking* (bukti ada-tidaknya akses vertikal terhadap elite pengambil kebijakan). Pengategorian ini kemudian dipetakan sepanjang garis waktu 2015–2026 untuk melihat pola perubahannya, terutama pada titik ketika status proyek bergeser dari kebijakan daerah menjadi Proyek Strategis Nasional. Dari pemetaan tematik tersebut, peneliti menafsirkan sejauh mana ketiga bentuk modal sosial berkontribusi terhadap representasi kepentingan publik dan responsivitas pemerintah, sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Kelompok Masyarakat dalam Merepresentasikan dan Menyuarakan Kepentingan Publik

Peran kelompok Masyarakat sipil dalam isu reklamasi Teluk Jakarta tidak dapat lagi dipahami sebagai sebuah bentuk penolakan atas Pembangunan pulau-pulau reklamasi seperti yang terjadi pada tahun 2016-2020. Memasuki periode tahun 2026, arena kontestasi kebijakan mengalami pergeseran seiring terintegrasinya reklamasi ke dalam proyek *Giant Sea Wall* (GSW) Pantai Utara Jawa Sebagai bagian dari strategi nasional mitigasi banjir pesisir dan adaptasi perubahan iklim.¹⁵ Pergeseran tersebut menunjukkan

¹⁵ Tikkyrino Kurniawan et al., "Revisiting the Climate Change Adaptation Strategy of Jakarta's Coastal Communities," *Ocean & Coastal Management* 253 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107112>

bahwa representasi kepentingan publik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil tidak lagi hanya berhadapan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tetapi berhadapan langsung dengan proyek yang berskala nasional yang didalamnya terdapat dukungan kepentingan negara dan investasi. Dalam konteks tersebut, kelompok masyarakat sipil sering menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena seringkali kepentingan hak perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir berbenturan dengan kepentingan agenda percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat sipil tetap menjalankan fungsi representasi kepentingan public, namun ruang artikulasi yang dimiliki semakin terbatas.¹⁶ WALHI, KNTI, KIARA, dan koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta, tetapi mereka juga mengkritisi bahwa proyek GSW dinilai sebagai “Solusi Palsu” terhadap krisis pesisir. Menurut mereka, pembangunan tanggul laut raksasa berpotensi mempercepat penambangan pasir laut, memperluas kerusakan ekosistem pesisir, menghilangkan ruang hidup nelayan tradisional, serta mengabaikan akar persoalan berupa penurunan muka tanah dan eksploitasi air tanah.¹⁷ Dengan demikian, isu yang diperjuangkan masyarakat sipil telah bergeser dari penolakan reklamasi Teluk Jakarta menjadi perjuangan memperoleh keadilan ekologis dan keadilan iklim dalam proses pembangunan pesisir.¹⁸

Jika dianalisis menggunakan teori Masyarakat Sipil dari Robert D. Putnam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial (*social capital*) dimana masyarakat sipil sebenarnya berkembang secara kuat pada tingkat horizontal. Solidaritas antar komunitas nelayan mencerminkan *bonding social capital*, sedangkan kolaborasi antar WALHI, KIARA, KNTI, dan para akademisi menunjukkan terbentuknya *bridging social capital* yang memungkinkan pertukaran informasi. Namun penelitian ini menemukan bahwa kedua bentuk modal sosial tersebut belum mampu menghasilkan responsivitas pemerintah karena *linking social capital*, yaitu hubungan vertikal dengan para elite pengambil Keputusan masih lemah. Akibatnya representasi kepentingan publik mengalami

¹⁶ A. Putri et al., "Transformasi Pesisir Jakarta: Kajian Komprehensif Giant Sea Wall untuk Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Ekologis," Jurnal Syntax Admiration 6, no. 1 (2025): 115-127, <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2016>.

¹⁷ R. Puspasari, S. T. Hartati, dan R. F. Anggawangsa, "Di Teluk Jakarta: Impact Analysis of Land Reclamation to Environment," Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 9, no. 2 (November 2017): 85-94, <https://doi.org/10.15578/jkpi.9.2.2017.85-94>.

¹⁸ G. A. K. Surtiari et al., "Social and Political Roots of Loss and Damage: A Study of Vulnerable Coastal Communities in Greater Jakarta," Journal of Disaster Research 20, no. 5 (2025): 710-725, <https://doi.org/10.20965/JDR.2025.P0710>.

hambatan ketika berhadapan dengan proyek strategis nasional yang memiliki dukungan politik yang kuat.

Temuan penelitian dari Paradise memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa WALHI memiliki peran penting sebagai organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi serta mobilisasi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan reklamasi.¹⁹ Namun penelitian ini menunjukkan perbedaan, pada konteks 2026, hambatan struktural tidak lagi hanya disebabkan karena kebijakan reklamasi saja yang tidak ditemukan di penelitian Paradise, tetapi juga menguat karena reklamasi telah menjadi bagian GSW yang diposisikan sebagai proyek strategis nasional.

Temuan ini juga memperkuat temuan mengenai full citizenship dalam Gerakan Nelayan, dimana Gerakan Masyarakat pesisir tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah tangkap, tetapi juga menuntut pengakuan atas hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak menjamin meningkatnya akses terhadap formulasi proses kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang representatif dan responsif ketika relasi kekuasaan masih didominasi oleh para elite dan kepentingan negara dan investasi.

Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa konflik reklamasi Teluk Jakarta tidak lagi semata-mata merupakan persoalan lokal, melainkan menjadi bagian dari perdebatan global mengenai *Climate Adaption* dan *Climate Justice*. Di berbagai negara, proyek-proyek perlindungan pesisir sering dipromosikan sebagai strategi perubahan iklim, padahal dalam praktiknya justru berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat dan memperbesar ketimpangan akses terhadap sumber daya pesisir. Oleh karena itu kasus teluk Jakarta memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur adaptasi iklim tidak hanya dinilai dari efektivitas teknisnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi representasi kepentingan masyarakat pesisir.

¹⁹ Muhammad Astar Paradise, "Peran Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Sebagai Civil Society Organization dalam Dinamika Reklamasi Teluk Jakarta" (PhD diss., Universitas Nasional, 2024), <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10185>.

2. Pengaruh Kelompok Masyarakat terhadap Dinamika Demokrasi Lokal

Keterlibatan kelompok masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Jakarta telah memperluas partisipasi publik secara signifikan. Alamsyah dan Wahyuningroem mencatat bahwa perlawanan nelayan mencerminkan aktualisasi kewargaan penuh, di mana warga bertransformasi dari objek kebijakan menjadi subjek yang aktif menuntut hak sipil dan sosial.²⁰ Namun, tesis ini memerlukan tinjauan kritis dimana transisi tersebut pada periode 2015–2018 tidak bersifat permanen, melainkan sangat bergantung pada konstelasi politik lokal. Kelompok masyarakat berfungsi sebagai katalisator yang merespons eksklusi struktural demi mempertahankan eksistensi ekonomi. Partisipasi ini secara kualitatif mengubah keterlibatan warga menjadi lebih kolektif dan terorganisir, sehingga memperkuat dinamika demokrasi lokal Jakarta, meskipun penguatan ini tidak selalu berbanding lurus dengan responsivitas pemerintah.

a. Aspek Partisipasi

Demonstrasi merupakan manifestasi utama partisipasi publik dalam gerakan ini. Alamsyah dan Samadhi mengonseptualisasikan perlawanan kelompok marginal tersebut sebagai upaya menantang dominasi kepentingan kapital.²¹ Keterlibatan perempuan nelayan memperkaya diskursus dengan mengangkat isu domestik dan ekonomi yang sebelumnya terabaikan. Aksi long march dari Muara Angke yang dicatat LBH Jakarta menjadi bukti konkret penolakan terhadap ancaman eksistensi kehidupan pesisir.²² Meski menghadapi tekanan aparat, nelayan tetap konsisten menyuarakan tuntutan mereka.²³ Fenomena ini merepresentasikan partisipasi politik sah bagi kelompok tanpa akses formal kebijakan, sekaligus memperluas ruang demokrasi melalui mobilisasi massal. Dalam kerangka Putnam, aksi kolektif ini merupakan wujud *bonding social*

²⁰ Syauiid Alamsyah dan Sri Lestari Wahyuningroem, "Aktualisasi Dimensi Kewargaan Penuh (Full Citizenship) dalam Gerakan Perlawanan Nelayan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016–2020," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 2 (2025): 159-179, <https://doi.org/10.14710/politika.16.2.2025.159-179>.

²¹ Syauiid Alamsyah dan Willy Purna Samadhi, "Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 229-242, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2878>.

²² LBH Jakarta, "Ratusan Nelayan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta," LBH Jakarta, 12 Maret 2015, <https://bantuanhukum.or.id/ratusan-nelayan-tolak-reklamasi-teluk-jakarta/>.

²³ BBC News Indonesia, "Ditolak Nelayan, Reklamasi Teluk Jakarta 'Jalan Terus,'" BBC Indonesia, 14 September 2016, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160913_indonesia_reklamasi_jakarta_jalant_erus.

capital, yakni solidaritas internal di antara nelayan dan perempuan pesisir yang berbagi kepentingan ekonomi serta ekologis.²⁴

Partisipasi masyarakat meluas ke ranah hukum melalui gugatan tata usaha negara. Kemenangan KNTI dan LBH Jakarta atas izin Pulau G di PTUN pada Mei 2016 menjadi preseden penting pemberdayaan kelompok marginal dalam mengoreksi kebijakan pemerintah.²⁵ Keberhasilan berlanjut pada Maret 2017 saat PTUN membatalkan izin Pulau F, I, dan K melalui persidangan komprehensif.²⁶ WALHI menegaskan bahwa putusan tersebut berpijak pada pelanggaran prosedur, terutama pengabaian partisipasi publik.²⁷ Meski mempertegas akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan publik, kemenangan litigasi ini bersifat prosedural daripada substantif. Putusan tersebut membatalkan izin administratif namun tidak menyentuh basis kekuasaan yang memungkinkan kemunculan kembali proyek serupa dalam kemasan kebijakan berbeda, seperti skema Proyek Strategis Nasional tahun 2026 yang akan didiskusikan selanjutnya.

Peran media dan kampanye digital secara signifikan memperluas partisipasi publik dalam penolakan reklamasi. Liputan konsisten media daring telah menetapkan isu ini sebagai prioritas publik yang mendesak,²⁸ sementara jejaring media sosial terbukti efektif dalam memobilisasi gerakan, menyebarkan informasi, dan mengonsolidasikan solidaritas lintas organisasi.²⁹ KIARA mencatat bahwa puncak kontroversi pada 2016 mentransformasi diskursus menjadi arena debat inklusif yang melibatkan beragam aktor, mulai dari nelayan hingga akademisi dan publik luas.³⁰ Dalam kerangka Putnam, media di sini bukan sekadar instrumen diseminasi informasi, melainkan katalisator *bridging social capital* yang menjembatani jaringan nelayan dengan aktor-aktor seperti akademisi, NGO

²⁴ Robert D. Putnam, Raffaella Y. Nanetti, dan Robert Leonardi, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).

²⁵ Hukum Online.com, "Gugatan Reklamasi, Nelayan Kalahkan Ahok," Hukum Online.com, 31 Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-reklamasi--nelayan-kalahkan-ahok-lt574d8fbdd1f5a/>.

²⁶ LBH Jakarta, "Hakim PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau F, I dan K," LBH Jakarta, 17 Maret 2017, <https://bantuanhukum.or.id/hakim-ptun-batalkan-izin-reklamasi-pulau-fi-dan-k/>.

²⁷ WALHI, "Kesimpulan Gugatan Reklamasi Pulau F, I dan K: Gubernur dan Pengembang Melanggar Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku!," WALHI, 6 Maret 2017, <https://www.walhi.or.id/kesimpulan-gugatan-reklamasipulau-f-dan-k-gubernur-dan-pengembang-melanggar-hukum-dan-peraturan-perundang-undangan-yang-berlaku>.

²⁸ Rhoma DY Reynaldi dan Humeira Bintan, "Praktik Jurnalisme Lingkungan di Media Daring: Analisis Isi Isu Reklamasi Teluk Jakarta di Media Kompas.com," *Jurnal Studi Jurnalistik* 3, no. 2 (2021): 21-39, <https://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22984>.

²⁹ Khairil Anam, Lala M. Kolopaking, dan Rilus A. Kinseng, "The Effectiveness of Social Media Usage within Social Movement to Reject the Reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 1 (April 2020): 64-81, <https://doi.org/10.22500/8202028955>.

³⁰ KIARA, "Kontroversi Proyek Reklamasi, Membara di Teluk Jakarta," KIARA, 12 April 2016, <https://www.kiara.or.id/2016/04/12/kontroversi-proyek-reklamasi-membara-di-teluk-jakarta/>.

nasional, dan opini publik perkotaan yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan langsung dengan isu pesisir. Dengan demikian, media berperan krusial dalam meningkatkan jangkauan sekaligus memperdalam kualitas keterlibatan warga terhadap kebijakan lokal.

Kerangka teori dari Robert D. Putnam menyediakan perspektif analitis krusial yang dapat dioperasionalisasikan melalui tiga dimensi. Pertama, *bonding social capital* tecermin dalam solidaritas internal nelayan Muara Angke akibat pengalaman kolektif kehilangan ruang hidup. Kedua, *bridging social capital* termanifestasi dalam aliansi nelayan bersama KNTI, WALHI, LBH Jakarta, dan KIARA, yang mentransformasi kepentingan individu menjadi aksi kolektif terorganisir.³¹ Ketiga, *linking social capital* perihal perluasan dari triad modal sosial Szreter dan Woolcock terhadap kerangka Putnam yang menekankan akses vertikal masyarakat sipil ke elite pengambil kebijakan.³² Meskipun gerakan nelayan Teluk Jakarta berhasil membangun *bonding* dan *bridging social capital*, keterbatasan akses vertikal ke elite nasional menyebabkan respons negara cenderung parsial dan didorong oleh kalkulasi elektoral. Temuan ini melengkapi literatur Putnam, yang umumnya berfokus pada ranah lokal-komunitarian, dengan menyoroti signifikansi akses vertikal dalam konteks negara sentralistik seperti Indonesia.

b. Aspek Responsivitas Pemerintah

Tekanan publik yang berkelanjutan memaksa pemerintah merespons tuntutan penghentian reklamasi, meskipun respons ini menyoroti keterbatasan akses vertikal gerakan nelayan. Pemerintah dan DPR memberlakukan moratorium proyek pada April 2016 akibat tumpang tindih regulasi dan pelanggaran izin lingkungan.³³ Langkah ini menunjukkan sensitivitas kebijakan, namun belum memenuhi tuntutan penghentian total dikarenakan dalam kerangka Putnam, respons ini mencerminkan sikap reaktif dan temporer, bukan keterlibatan struktural elite dalam agenda komunitas pesisir. Selain itu, demonstrasi di Kedutaan Besar Belanda pada November 2016 membuahkan janji dialog diplomatik terkait keterlibatan perusahaan Belanda.³⁴ Di sisi lain, putusan PTUN

³¹ Putnam, Leonardi, dan Nanetti, *Making Democracy Work*, 173–174.

³² Simon Szreter dan Michael Woolcock, "Health by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Health," *International Journal of Epidemiology* 33, no. 4 (2004): 650–667, <https://doi.org/10.1093/ije/dyh013>.

³³ Hukum Online, "Soal Reklamasi Teluk Jakarta, DPR dan Pemerintah Sepakat Distop Sementara," Hukum Online, 18 April 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-reklamasi-teluk-jakarta--dpr-dan-pemerintah-sepakat-distopsementara-lt5714abf4490e8/>.

³⁴ KBR, "Reklamasi, Pemerintah Belanda Ajak Dialog Nelayan Jakarta Pekan Depan," KBR, 23 November 2016,

menegaskan kegagalan pemerintah memenuhi mandat partisipasi publik, yang memperkuat urgensi responsivitas pemerintah.³⁵ Secara keseluruhan, tekanan publik yang konsisten mampu menggeser prioritas kebijakan, meskipun dampaknya masih terbatas pada penundaan operasional, bukan penghentian permanen.

Responsivitas pemerintah mencapai puncaknya pada 2018–2019, ditandai dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan mencabut izin proyek reklamasi pada September 2018, langkah yang memenuhi janji kampanye sekaligus aspirasi masyarakat pesisir.³⁶ Keberhasilan ini mengonfirmasi signifikansi gerakan sipil dalam memengaruhi kebijakan daerah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kalkulasi elektoral kepala daerah, bukan semata pada kekuatan tuntutan publik.³⁷ Dinamika ini sebelumnya diwarnai ketidakpastian, sebagaimana terlihat saat Menko Maritim Luhut Panjaitan mencabut moratorium dan melanjutkan pembangunan 17 pulau pada Oktober 2017, yang mencerminkan tajamnya kontestasi antara kepentingan investasi pusat dan aspirasi lokal.³⁸ Kontestasi tersebut menjadi acuan krusial bagi konteks 2026, di mana kebijakan pusat berpotensi menganulir konsensus lokal melalui instrumen Proyek Strategis Nasional (PSN). Akhirnya, era kebijakan Anies membuktikan bahwa mobilisasi sipil yang konsisten mampu membuahkan hasil, meski efektivitasnya tetap terikat pada konstelasi politik yang berkuasa.

Respons pemerintah sejatinya belum menjawab tuntutan substansial masyarakat. LBH Jakarta mengklasifikasikan pencabutan izin tersebut sebagai langkah politis ("gimik") lantaran operasional pulau reklamasi yang telah terbangun terus berjalan.³⁹ Dalam kerangka Putnam, "gimik" ini merefleksikan lemahnya akses vertikal nelayan, pencabutan izin hanya merupakan konsesi elektoral lokal tanpa menyentuh kontrol elite ekonomi-politik atas tata ruang Teluk Jakarta. Selain itu, muncul potensi konflik agraria

https://kbr.id/articles/indeks/reklamasi_pemerintah_belanda_ajak_dialog_nelayan_jakarta_pekan_depan#google_vignette.

³⁵ WALHI, "Kesimpulan Gugatan Reklamasi Pulau F, I dan K."

³⁶ BPK RI, "Anies Cabut Izin Pulau Reklamasi, Fahira Idris: Janji Dibayar Lunas," BPK RI, 12 Oktober 2018, <https://jakarta.bpk.go.id/anies-cabut-izin-pulau-reklamasi-fahira-idris-janji-dibayar-lunas/>.

³⁷ BBC News Indonesia, "Anies Baswedan Keluarkan IMB Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Walhi Sebut Langkah Itu 'Tak Konsisten' dengan Janji Kampanye," BBC News Indonesia, 17 Juni 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia48659589>.

³⁸ Detik News, "Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta," Detik News, 6 Oktober 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3673155/menko-luhut-cabut-moratorium-17-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta>.

³⁹ KOMPAS, "LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka," KOMPAS, 18 Oktober 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/18/16252991/lbh-jakarta-pencabutan-izin-reklamasi-oleh-anies-hanyagimik-belaka>.

baru terkait hak tanah dan peruntukan lahan reklamasi.⁴⁰ Kebijakan ini lebih didorong oleh lobi pengembang dan kalkulasi elektoral daripada komitmen murni terhadap aspirasi komunitas.⁴¹ Ketimpangan ini menunjukkan respons pemerintah bersifat parsial, sehingga efektivitasnya dalam mengakomodasi aspirasi publik pada kasus reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat sipil.

YLBHI menilai penghentian parsial reklamasi gagal memulihkan hak asasi nelayan tradisional.⁴² Responsivitas pemerintah yang sarat pertimbangan ekonomi-politik membuktikan bahwa kebijakan tersebut belum menyentuh transformasi substansial bagi masyarakat pesisir. Temuan ini menantang tesis "kewargaan penuh" dari Alamsyah dan Wahyuningroem, jika kewargaan penuh mensyaratkan pengakuan setara terhadap warga sebagai subjek kebijakan, kasus Teluk Jakarta menunjukkan bahwa pengakuan tersebut bersifat kondisional dan reversibel, bukan capaian permanen.

Perspektif ini relevan dalam meninjau proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) yang akan dimulai pada September 2026. Dengan penambahan porsi pembangunan menjadi 19 km di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN),⁴³ otoritas pengambilan keputusan bergeser dari ranah daerah yang relatif dapat dijangkau, ke ranah pusat yang lebih tertutup. Penolakan WALHI dan KNTI terhadap GSW yang mengancam penghidupan nelayan tradisional di pesisir utara Jawa kini menghadapi tantangan yang lebih kompleks.⁴⁴ Jika pada 2016 gerakan sosial mampu menempuh jalur PTUN untuk menggugat pengembang swasta, pada 2026 mereka berhadapan dengan proyek yang dilegitimasi melalui narasi kedaruratan iklim dan status PSN, yang secara hukum jauh lebih sulit diintervensi melalui litigasi administratif biasa.

⁴⁰ Yusuf Saepul Zamil, Yulinda Adharani, dan Siti Sarah Afifah, "Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Pembaruan Agraria," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 225-275, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/84>.

⁴¹ Sharah Alisha, "Dinamika Politik Pencabutan Izin Pembangunan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta" (PhD diss., Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/82209/>.

⁴² YLBHI, "Reklamasi Teluk Jakarta Melanggar HAM," YLBHI, 20 April 2016, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaranpers/reklamasi-teluk-jakarta-melanggar-ham/>.

⁴³ CNN Indonesia, "Pramono Umumkan Groundbreaking Giant Sea Wall Dimulai September 2026," CNN Indonesia, 20 Januari 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260120143208-20-1318893/pramono-umumkangroundbreaking-giant-sea-wall-dimulai-september-2026>

⁴⁴ WALHI, "Tanggul Laut Raksasa, Solusi Palsu Krisis Iklim serta Percepat Kebangkrutan Ekologis Daratan dan Perairan Pulau Jawa," WALHI, 2026, <https://www.walhi.or.id/tanggul-laut-raksasa-solusi-palsu-krisis-iklim-serta-percepat-kebangkrutanekologis-daratan-dan-perairan-pulau-jawa>

Tabel 1. Matriks Kontestasi Demokrasi dalam Kasus Reklamasi Teluk Jakarta (2015–2026)

Jenis Partisipasi	Target Sasaran	Tingkat Responsivitas Negara	Hambatan Struktural 2026
Demonstrasi & long march (2015–2016)	Pemprov DKI Jakarta	Reaktif-simbolik: moratorium sementara	Ruang aksi lokal tetap terbuka, namun target kebijakan bergeser ke pusat
Litigasi PTUN (2016–2017)	Pengembang & Pemprov DKI	Prosedural: pembatalan izin administratif	Status PSN membuat proyek lebih sulit dijerat lewat gugatan administratif biasa
Kampanye digital & media (2016–2018)	Opini publik & Pemprov DKI	Tidak langsung: memengaruhi tekanan elektoral	Narasi kedaruratan iklim negara menyaingi framing keadilan nelayan di ruang media
Advokasi WALHI/KNTI menolak Giant Sea Wall (2026)	Otoritas pusat (skema PSN)	Minim/linking capital rendah	Legitimasi hukum kedaruratan iklim & PSN mempersempit ruang partisipasi lokal

Sumber: Diolah penulis berdasarkan WALHI (2016), CNN Indonesia (2026), ANTARA News (2026), dan berbagai sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian (2026).

Secara keseluruhan, perlawanan terhadap reklamasi Teluk Jakarta membuktikan kapasitas gerakan sosial dalam mentransformasi warga pasif menjadi aktor politik aktif melalui aksi kolektif dan litigasi. Mengacu pada kerangka Putnam, keberhasilan ini menegaskan peran krusial *bonding* dan *bridging social capital* dalam memengaruhi kebijakan daerah. Namun, lemahnya akses vertikal terhadap elite pusat menyebabkan respons negara cenderung bersifat parsial dan rentan dianulir oleh kepentingan strategis yang lebih besar.⁴⁵ Berbeda dengan optimisme literatur terdahulu mengenai "kewargaan penuh," temuan ini menunjukkan bahwa kemenangan masyarakat sipil di Indonesia bersifat kondisional. Capaian tersebut mudah direlativisasi saat otoritas pengambilan kebijakan bergeser dari ranah daerah ke pusat, sebagaimana terlihat pada peralihan proyek dari reklamasi konvensional ke skema PSN pada *Giant Sea Wall*.

Dinamika ini mencerminkan ketegangan global antara *climate justice* dan otoritarianisme lingkungan. Literatur *climate justice* menegaskan bahwa pelibatan komunitas rentan adalah syarat mutlak keadilan, sehingga eksklusi warga pesisir dalam

⁴⁵ Putnam, Leonardi, dan Nanetti, *Making Democracy Work*, 181–183.

kebijakan iklim mencederai prinsip tersebut.⁴⁶ Di sisi lain, otoritarianisme lingkungan melegitimasi sentralisasi keputusan demi urgensi ekologis, yang kerap menafikan proses demokratis.⁴⁷ Dalam kasus *Giant Sea Wall*, narasi kedaruratan iklim dan status Proyek Strategis Nasional (PSN) digunakan untuk meminggirkan keberatan nelayan sebagai sekadar hambatan teknis, alih-alih bagian sah dari dialog partisipatif. Kendati berkontribusi pada pengawasan publik, gerakan ini masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan infrastruktur nasional pada 2026.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok masyarakat sipil di Teluk Jakarta, seperti WALHI, KNTI, dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, telah membangun *bonding* dan *bridging social capital* yang kuat melalui solidaritas nelayan dan aliansi lintas organisasi, sehingga berhasil memperluas partisipasi publik dan mendorong konsesi kebijakan berupa moratorium serta pencabutan sejumlah izin reklamasi. Namun, *linking social capital*, yaitu akses vertikal terhadap elite pengambil keputusan, tetap menjadi titik lemah yang membuat responsivitas pemerintah bersifat parsial dan kerap bersifat simbolik. Ketika isu ini berevolusi menjadi Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall pada 2026, ruang representasi yang dahulu dapat dijangkau di tingkat daerah kini bergeser ke otoritas pusat yang lebih tertutup, sehingga kapasitas kelompok masyarakat untuk memengaruhi kebijakan menjadi semakin terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal pada kasus infrastruktur pesisir berskala nasional menuntut pembukaan kanal *linking social capital* yang baru, bukan sekadar konsolidasi solidaritas akar rumput semata.

⁴⁶ David Schlosberg dan Lisette B. Collins, "From Environmental to Climate Justice: Climate Change and the Discourse of Environmental Justice," *WIREs Climate Change* 5, no. 3 (2014): 359–374, <https://doi.org/10.1002/wcc.275>.

⁴⁷ Mark Beeson, "The Coming of Environmental Authoritarianism," *Environmental Politics* 19, no. 2 (2010): 276–294, <https://doi.org/10.1080/09644010903576918>.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Syauiid, dan Willy Purna Samadhi. "Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 82 (2023): 229–42. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2878>
- Alamsyah, Syauiid, dan Sri Lestari Wahyuningroem. "Aktualisasi Dimensi Kewargaan Penuh (Full Citizenship) Dalam Gerakan Perlawanan Nelayan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta Tahun 2016-2020." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 2 (2025): 159–79. <https://doi.org/10.14710/politika.16.2.2025.159-179>
- Alisha, Sharah. "DINAMIKA POLITIK PENCABUTAN IZIN PEMBANGUNAN PULAU REKLAMASI TELUK JAKARTA." *PhD diss., Universitas Airlangga*, 2019. <https://repository.unair.ac.id/82209/>
- Anam, Khairil, Lala M Kolopaking, dan Rilus A Kinseng. "The Effectiveness of Social Media Usage within Social Movement to Reject the Reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 1 (April 2020): 64–81. <https://doi.org/10.22500/8202028955>.
- ANTARA News Megapolitan. "'Groundbreaking' Giant Sea Wall Dijadwalkan Pada September 2026." *ANTARA*, 20 Januari 2026. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/486434/groundbreakinggiant-sea-wall-dijadwalkan-pada-september-2026>.
- BBC News Indonesia. "Ditolak nelayan, reklamasi Teluk Jakarta 'jalan terus.'" *BBC Indonesia*, 14 September 2016. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160913_indonesia_reklamasi_jakarta_jalanterus.
- BBC News Indonesia. "Nelayan dan pegiat desak Belanda hentikan keterlibatan di proyek reklamasi Jakarta." *BBC Indonesia*, 23 November 2016. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38074283>.
- BBC News Indonesia. "Anies Baswedan keluarkan IMB pulau reklamasi pantai utara Jakarta, Walhi sebut langkah itu 'tak konsisten' dengan janji kampanye." *BBC News Indonesia*, 17 Juni 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48659589>.
- BBC News Indonesia. "PTUN cabut izin reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta." *BBC Indonesia*, 17 Maret 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056>.
- Beeson, Mark. "The Coming Of Environmental Authoritarianism." *Environmental Politics* 19, No. 2 (2010): 276–294. <https://doi.org/10.1080/09644010903576918>.
- BPK RI. "Anies Cabut Izin Pulau Reklamasi, Fahira Idris: Janji Dibayar Lunas." *BPK RI*, 12 Oktober 2018. <https://jakarta.bpk.go.id/anies-cabut-izin-pulau-reklamasi-fahira-idris-janji-dibayar-lunas/>.
- CNN Indonesia. "Pramono Umumkan Groundbreaking Giant Sea Wall Dimulai September 2026." *CNN Indonesia*, 20 Januari 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260120143208-20-1318893/pramono-umumkan-groundbreaking-giant-sea-wall-dimulai-september-2026>.

- Darmawan, Ikhsan. "Menggugat (Praktik) Representasi Politik." *Jurnal Politik* 2, no. 2 (2017): 6. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.1119>
- Detik News. "Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta." Detik News, 6 Oktober 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3673155/menko-luhut-cabut-moratorium-17-pulau-reklamasi-di-teluk-jakarta>.
- Hans, Amril. *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori dan Implementasi*. Unhas Press, 2022.
- Hukum Online. "Soal Reklamasi Teluk Jakarta, DPR dan Pemerintah Sepakat Distop Sementara." *Hukum Online*, 18 April 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-reklamasi-teluk-jakarta--dpr-dan-pemerintah-sepakat-distop-sementara-lt5714abf4490e8/>.
- Hukum Online.com. "Gugatan Reklamasi, Nelayan Kalahkan Ahok." *Hukum Online.com*, 31 Mei 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-reklamasi--nelayan-kalahkan-ahok-lt574d8fbd1f5a/>.
- Indonesia Corruption Watch. *Ini 19 Alasan Tolak Reklamasi Jakarta*. . 13 April 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/ini-19-alasan-tolak-reklamasi-jakarta>.
- Jubaedah, Edah. "Peran Hubungan Masyarakat Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 4, no. 3 (2007). <https://doi.org/10.31113/jia.v4i3.397>.
- KBR. "Reklamasi, Pemerintah Belanda Ajak Dialog Nelayan Jakarta Pekan Depan." *KBR*, 23 November 2016. https://kbr.id/articles/indeks/reklamasi_pemerintah_belanda_ajak_dialog_nelayan_jakarta_pekan_depan#google_vignette.
- KIARA. "Kontroversi Proyek Reklamasi, Membara di Teluk Jakarta." *KIARA*, 12 April 2016. <https://www.kiara.or.id/2016/04/12/kontroversi-proyek-reklamasi-membara-di-teluk-jakarta/>.
- KOMPAS. "LBH Jakarta: Pencabutan Izin Reklamasi oleh Anies Hanya Gimik Belaka." *KOMPAS*, 18 Oktober 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/18/16252991/lbh-jakarta-pencabutan-izin-reklamasi-oleh-anies-hanya-gimik-belaka>.
- Kompas. "Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta #ReklamasiJakarta." *Interaktif Kompas*. <https://interaktif.kompas.id/baca/reklamasijakarta/>.
- LBH Jakarta. "Hakim PTUN Batalkan Izin Reklamasi Pulau F,I dan K." *LBH Jakarta*, 17 Maret 2017. <https://bantuanhukum.or.id/hakim-ptun-batalkan-izin-reklamasi-pulau-fi-dan-k/>.
- LBH Jakarta. "Ratusan Nelayan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta." *LBH Jakarta*, 12 Maret 2015. <https://bantuanhukum.or.id/ratusan-nelayan-tolak-reklamasi-teluk-jakarta/>.

- LBH Jakarta. "Reklamasi Teluk Jakarta, Proyek Ambisius Penuh Pelanggaran." LBH Jakarta, 1 April 2016. <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-ambisius-penuh-pelanggaran/>.
- Paradise, Muhammad Astar. "Peran Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Sebagai Civil Society Organization Dalam Dinamika Reklamasi Teluk Jakarta." *PhD diss., Universitas Nasional*, 2024. <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/10185>
- Prabowo, Hendro, Mahargyantari P. Dewi, Henny Regina Salve, dan Agung Wahyudi. "Saatnya Mengembangkan (Lagi) Community Based Development di Kawasan Pesisir Indonesia." *Prosiding Temu Ilmiah* 9, no. 1 (Desember 2021): K039-48. <https://doi.org/10.32315/ti.9.k039>.
- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. (2017). *Di Teluk Jakarta Impact Analysis of Land Reclamation To Environment*. 9(November), 85-94. <https://doi.org/10.15578/jkpi.9.2.2017.85-94>
- Putnam, Robert D., Raffaella Y. Nanetti, dan Robert Leonardi. *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ, USA: Princeton university press, 1994.
- Putri, A., Richardo, B. Y., Zid, M., Setiawan, C., & Seta, A. K. (2025). Transformasi Pesisir Jakarta: Kajian Komprehensif Giant Sea Wall untuk Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Ekologis. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 115-127. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2016>
- Ramadhan, Muhammad Faadhil Lathif, dan Urip Rahmani. "Pengaruh Reklamasi Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Di Daerah Kamal Muara Jakarta Utara the Influence of Reclamation of the Results of Fish Catch in the Kamal Muara North Jakarta." *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari* 5, no. 1 (2019): 40-49. <http://perikanan.usni.ac.id>.
- Reynaldi, Rhoma DY, dan Humeira Bintan. "Praktik Jurnalisme Lingkungan di Media Daring: Analisis Isi Isu Reklamasi Teluk Jakarta di Media Kompas. com." *Jurnal Studi Jurnalistik* 3, no. 2 (2021): 21-39. <http://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22984>
- Rizqiah, Liza, dan Atika Puspita Marzaman. "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan Dan Keragaman Sumber Daya Laut." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (Desember 2023): 247-53. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i04.890>.
- Royandi, Eva, dan Ricardus Keiya. "Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (Februari 2019): 77-98. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.3619>.
- Santo. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." *Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area*, 18 Juni 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/partisipasi-masyarakat-dalam-proses-pembuatan-kebijakan-publik/>.

- Schlosberg, David, dan Lisette B. Collins. "From Environmental To Climate Justice: Climate Change And The Discourse Of Environmental Justice." *WIREs Climate Change* 5, No. 3 (2014): 359–374. <https://doi.org/10.1002/wcc.275>.
- Sisk, Timothy D., Julie Ballington, Arif Subiyanto, dan Sarah Maxim. "Demokrasi di tingkat lokal: buku panduan International IDEA mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik, dan pemerintahan. ." *International IDEA*, 2002.
- Surtiari, G. A. K., Dalimunthe, S. A., Sasaki, D., Maekawa, M., Yossa, N., Permana, Y. S., Afriansyah, A., Ningrum, V., Vibriyanti, D., Seftiani, S., Jibiki, Y., Hara, Y., & Nawawi. (2025). Social and Political Roots of Loss and Damage: A Study of Vulnerable Coastal Communities in Greater Jakarta. *Journal of Disaster Research*, 20(5), 710–725. <https://doi.org/10.20965/JDR.2025.P0710>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Szreter, Simon, dan Michael Woolcock. "Health By Association? Social Capital, Social Theory, And The Political Economy Of Public Health." *International Journal Of Epidemiology* 33, No. 4 (2004): 650– 667. <https://doi.org/10.1093/ije/dyh013>.
- Tikkyrino Kurniawan, Agus Heri Purnomo, Alan Ray Farandy, & Apriliani, T. (2024). Revisiting the climate change adaptation strategy of Jakarta's coastal communities. *Science Direct*, 253. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107112>
- Wahyudiono. *Representasi Politik dan Saluran Aspirasi Masyarakat dalam Kebijakan Daerah*. Pustaka Akademik., 2025.
- WALHI. "Kesimpulan Gugatan Reklamasi Pulau F, I dan K: Gubernur dan Pengembang Melanggar Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku!" WALHI, 6 Maret 2017. <https://www.walhi.or.id/kesimpulan-gugatan-reklamasi-pulau-f-dan-k-gubernur-dan-pengembang-melanggar-hukum-dan-peraturan-perundang-undangan-yang-berlaku>.
- WALHI. "Tanggul Laut Raksasa, Solusi Palsu Krisis Iklim Serta Percepat Kebangkrutan Ekologis Daratan Dan Perairan Pulau Jawa." WALHI, 2026. <https://www.walhi.or.id/tanggul-laut-raksasa-solusi-palsukrisis-iklim-serta-percepat-kebangkrutan-ekologis-daratan-dan-perairan-pulau-jawa>.
- YLBHI. "Reklamasi Teluk Jakarta Melanggar HAM." YLBHI, 20 April 2016. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/reklamasi-teluk-jakarta-melanggar-ham/>.
- Zamil, Yusuf Saepul, Yulinda Adharani, dan Siti Sarah Afifah. "Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Pembaruan Agraria." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 255–75. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/84>.